

Peran Indonesia dalam Struktur Pemerintahan Internasional untuk Mewujudkan Perdamaian Global pada Abad 21

Dhea Ayu Refansa¹, Insyira Yusdiawan Azhar²

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

e-mail: revanzadhea@gmail.com

Abstrak

Indonesia, melalui prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan perdamaian global baik di tingkat internasional maupun regional. Dengan keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan regional seperti ASEAN, Indonesia berfokus pada penyelesaian konflik dan mendorong kerjasama multilateral. Negara ini berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan diplomatik yang berbasis pada hukum internasional. Peran Indonesia yang aktif dalam misi penjaga perdamaian, diplomasi, serta upaya membangun kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN memperlihatkan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Keberhasilan Indonesia dalam diplomasi internasional ini menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan luar negeri yang independen dan aktif dapat menjadi aktor penting dalam upaya perdamaian global.

Kata Kunci: ASEAN, Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia, PBB, Perdamaian Global

Abstract

Indonesia, through its foreign policy principle of free and active, plays a significant role in fostering global peace both internationally and regionally. By engaging in various international organizations such as the United Nations (UN) and regionally through ASEAN, Indonesia focuses on conflict resolution and promoting multilateral cooperation. The country is committed to resolving disputes through diplomatic means based on international law. Indonesia's active involvement in peacekeeping missions, diplomacy, and efforts to strengthen economic cooperation within the ASEAN region demonstrates its contribution to global peace and stability. Indonesia's success in international diplomacy highlights that a country with an independent and active foreign policy can play a key role in global peace efforts.

Keywords: ASEAN, Free and Active, Global Peace, Indonesia Diplomacy, UN

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21, dunia mengalami perubahan besar yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dalam dinamika global yang semakin kompleks ini, pentingnya kerjasama antarnegara untuk mewujudkan perdamaian global menjadi semakin jelas. Struktur pemerintahan internasional, yang mencakup organisasi dan lembaga-lembaga internasional, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dunia. Salah satu negara yang semakin menunjukkan peran aktif dalam upaya tersebut adalah Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam merancang kebijakan global yang berfokus pada perdamaian (Yusuf et al., 2022). Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara, memiliki posisi strategis dalam peta geopolitik global.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan multilateralismo, Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran konstruktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Dengan pengalaman panjang dalam diplomasi internasional, Indonesia berusaha untuk tidak hanya menjaga kedamaian dalam negeri tetapi juga berkontribusi pada perdamaian internasional (Utama et al., 2023). Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri

Indonesia yang berfokus pada penyelesaian konflik secara damai, mediasi, dan pemberdayaan negara-negara yang lebih lemah di dunia internasional (Setiyaningsih et al., 2020).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan anggota aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta *Non-Aligned Movement* (NAM), Indonesia berperan sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di forum-forum internasional seperti PBB, ASEAN, dan G-20 (Santoso et al., 2023). Peran aktif Indonesia dalam berbagai pertemuan internasional membuktikan komitmen negara ini untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik. Struktur pemerintahan internasional abad ke-21 didominasi oleh organisasi-organisasi yang berfokus pada penyelesaian masalah global, seperti PBB, WTO, IMF, dan Bank Dunia. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya terlibat dalam organisasi-organisasi ini, tetapi juga memainkan peran aktif dalam upaya memajukan nilai-nilai multilateral dan menciptakan solusi yang adil bagi negara-negara di dunia (Yusuf et al., 2022). Indonesia menyadari bahwa perdamaian global tidak dapat dicapai tanpa adanya kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan antara negara-negara di seluruh dunia. Salah satu kontribusi utama Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global adalah dalam penyelesaian konflik di berbagai kawasan. Indonesia telah berperan dalam berbagai upaya mediasi, seperti dalam konflik antara negara-negara ASEAN, serta dalam konflik yang lebih besar di Timur Tengah dan Afrika. Peran Indonesia dalam struktur pemerintahan internasional juga tercermin dalam kebijakan luar negeri yang mendukung resolusi masalah global seperti perubahan iklim, terorisme, dan migrasi. Dalam konteks ini, Indonesia memanfaatkan posisinya di forum-forum internasional untuk mendorong kerjasama global yang lebih baik dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Indonesia memahami bahwa masalah-masalah global tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi internasional yang solid dan komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan kualitatif untuk menganalisis peran Indonesia dalam struktur pemerintahan internasional dalam upayanya mewujudkan perdamaian global pada abad ke-21. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan terkait dengan topik yang dibahas, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen resmi dari organisasi internasional dan lembaga pemerintah. Dengan metode ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks, teori, dan kebijakan internasional yang mempengaruhi peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Pada tahap pertama, studi literatur akan difokuskan pada kajian terhadap literatur yang membahas teori-teori internasional, struktur pemerintahan global, dan kebijakan luar negeri Indonesia. Peneliti akan menelaah berbagai sumber untuk mengidentifikasi peran Indonesia dalam diplomasi internasional, termasuk keterlibatannya dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Selain itu, peneliti juga akan mengkaji kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik internasional dan upayanya dalam mempromosikan prinsip-prinsip perdamaian global. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang praktik dan dinamika yang terjadi dalam diplomasi Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara deskriptif dan analitis, yang melibatkan observasi dan analisis terhadap proses diplomatik yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks perdamaian global. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan antara lain analisis konten dari dokumen diplomatik, laporan tahunan organisasi internasional, serta wawancara dengan pakar hubungan internasional atau diplomat yang memiliki pengalaman terkait.

Selain itu, metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman lebih lanjut tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga perdamaian global, termasuk faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara ini. Peneliti akan menganalisis data dengan cara yang komprehensif, menghubungkan temuan-temuan dari studi literatur dengan realitas yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Indonesia dapat

terus berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian global melalui kebijakan luar negeri yang berbasis pada prinsip multilateralismo dan diplomasi damai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Bebas Aktif dalam Diplomasi Indonesia

Prinsip "bebas aktif" adalah landasan utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang telah diterapkan sejak negara ini merdeka pada tahun 1945. Prinsip ini mengandung dua aspek penting, yakni kebebasan untuk tidak terikat pada blok kekuatan tertentu dan keterlibatan aktif dalam upaya diplomasi global. Dengan demikian, Indonesia tidak terjebak dalam persaingan ideologi atau aliansi politik yang terjadi di kancah internasional, namun tetap berperan aktif dalam berbagai isu global.

Prinsip bebas aktif ini juga mencerminkan sikap Indonesia yang ingin menjaga kemerdekaan dan kedaulatan dalam menentukan kebijakan luar negerinya tanpa terpengaruh oleh tekanan dari kekuatan besar, baik Barat maupun Timur (Soebadio, 2016; Hendra, 2017). Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengutamakan prinsip ini dalam setiap aspek hubungan internasionalnya. Salah satu contohnya adalah ketika Indonesia aktif dalam Gerakan Non-Blok (GNB) yang didirikan pada tahun 1961. GNB berperan sebagai forum yang berusaha untuk menjaga netralitas dan kemerdekaan negara-negara berkembang di tengah ketegangan Perang Dingin antara blok Barat dan Timur. Indonesia, sebagai salah satu pendiri GNB, telah menunjukkan komitmennya terhadap upaya menciptakan perdamaian dan keadilan global tanpa terjebak dalam persaingan ideologi (Hernawan, 2019).

Dalam konteks perdamaian global, prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran penting sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian konflik internasional. Salah satu contoh konkret adalah peran Indonesia dalam proses perdamaian di Aceh. Pada awal tahun 2000-an, konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memuncak. Indonesia menggunakan prinsip bebas aktifnya untuk menjembatani kedua pihak, dengan melibatkan negara-negara lain sebagai fasilitator. Pada tahun 2005, perundingan yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia di Helsinki menghasilkan kesepakatan damai yang bersejarah, mengakhiri konflik yang berlangsung lebih dari tiga dekade (Bakti, 2007).

Selain itu, Indonesia juga menggunakan prinsip bebas aktif dalam menangani isu-isu global lainnya yang berkaitan dengan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Indonesia adalah perubahan iklim. Dalam forum internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP), Indonesia aktif menyuarakan pentingnya kerjasama global untuk mengatasi perubahan iklim, meskipun Indonesia bukanlah negara penghasil emisi terbesar di dunia (Yusuf, 2018).

Indonesia mendorong negara-negara maju untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengurangi emisi dan membantu negara-negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim. Prinsip bebas aktif juga tercermin dalam komitmen Indonesia untuk menghadapi ancaman terorisme global. Indonesia, meskipun memiliki tantangan dalam negeri terkait dengan kelompok teroris, tetap berperan aktif dalam upaya internasional untuk memerangi terorisme. Indonesia terlibat dalam berbagai kerjasama multilateral, seperti melalui ASEAN, PBB, dan lembaga internasional lainnya, untuk memerangi terorisme secara bersama-sama (Sihombing, 2020). Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, Indonesia juga tidak mengabaikan masalah kesenjangan ekonomi internasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki komitmen untuk memperjuangkan sistem perdagangan internasional yang adil dan mengurangi ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional seperti WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), dan G20, di mana Indonesia terus memperjuangkan hak-hak negara berkembang dalam sistem perdagangan global (Widodo, 2021).

Keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Internasional dan Perannya di PBB

Indonesia, sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kancah internasional, telah menjadi anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak bergabung pada tahun 1950.

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan perdamaian, keamanan, dan pembangunan internasional yang menjadi fokus utama PBB. Keterlibatan Indonesia dalam PBB mencerminkan komitmennya terhadap nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi organisasi internasional ini.

Dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia mampu memanfaatkan posisinya untuk berkontribusi secara signifikan dalam berbagai inisiatif global yang diselenggarakan oleh PBB (Arifin, 2020). Salah satu peran utama Indonesia dalam PBB adalah dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian atau *peacekeeping missions*. Indonesia telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara konflik di dunia sebagai bagian dari kontribusinya dalam memelihara perdamaian dan stabilitas global. Misalnya, Indonesia terlibat dalam misi penjaga perdamaian di Timor Leste pasca-referendum 1999, ketika negara ini memperoleh kemerdekaannya dari Indonesia. Indonesia memainkan peran penting dalam mengawal proses transisi politik di Timor Leste dengan mengirimkan pasukan dan personel yang turut membantu memulihkan keamanan di wilayah tersebut.

Misi ini tidak hanya mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan di kawasan Asia, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam mendukung perdamaian melalui operasi internasional di bawah payung PBB. Keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Timor Leste juga menjadi contoh nyata kontribusi positif negara ini dalam mendukung inisiatif perdamaian PBB (Rachman, 2021). Selain itu, Indonesia turut aktif dalam mendukung berbagai resolusi yang berhubungan dengan penyelesaian konflik internasional, baik di Timur Tengah, Afrika, maupun Asia Selatan.

Diplomasi Indonesia dalam Organisasi Regional ASEAN

Indonesia, sebagai negara pendiri dan salah satu pemain kunci dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut. ASEAN, yang dibentuk pada tahun 1967 oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, bertujuan untuk memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan sosial di antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terbesar di ASEAN, memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi kebijakan kawasan dan memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Keberadaan Indonesia dalam ASEAN sangat penting tidak hanya dalam konteks hubungan bilateral antarnegara anggota, tetapi juga dalam upaya menciptakan suatu kawasan yang damai dan stabil di tengah ketegangan geopolitik global (ASEAN Secretariat, 2020).

Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam memimpin inisiatif perdamaian dan kerjasama di kawasan, serta memainkan peran sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, yang telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Meskipun Indonesia sendiri tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial di Laut Cina Selatan, negara ini telah berperan sebagai negara penengah yang aktif dalam mendorong penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi. Indonesia berusaha menjaga netralitas dalam sengketa tersebut dan mendorong negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan perbedaan mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Dengan pendekatan ini, Indonesia bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perdamaian dan kerjasama regional tanpa harus terjebak dalam ketegangan yang semakin memburuk (United Nations, 2019). Selain itu, Indonesia juga mendukung penerapan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang diluncurkan pada tahun 2019. Pandangan ini menekankan pentingnya menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dengan fokus pada perdamaian, stabilitas, dan kerjasama antarnegara.

Dalam konteks ini, Indonesia menekankan perlunya penyelesaian sengketa melalui dialog dan penguatan kerja sama ekonomi, sosial, serta budaya yang dapat mempererat hubungan antarnegara di kawasan tersebut. Sebagai negara yang memiliki posisi sentral dalam kawasan

Indo-Pasifik, Indonesia berperan sebagai penghubung antara negara-negara ASEAN dan kekuatan global seperti Amerika Serikat, China, India, dan Jepang, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan ini. Indonesia memperjuangkan agar ASEAN tetap menjadi pusat dari arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, tanpa terjebak dalam persaingan kekuatan besar yang dapat merugikan stabilitas kawasan (ASEAN Secretariat, 2019).

Indonesia dan Isu Perubahan Iklim dalam Diplomasi Global

Perubahan iklim menjadi salah satu isu besar yang mempengaruhi perdamaian global, terutama mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan manusia, ekonomi, dan ekosistem di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terpapar dampak perubahan iklim, seperti kebakaran hutan dan perubahan pola cuaca yang ekstrem, memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.

Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai kebijakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan global, seperti implementasi kebijakan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP).

Di mana Indonesia mendorong negara-negara besar untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pengurangan emisi dan untuk membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia mengedepankan pendekatan multilateral dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim, dengan menyarankan kerjasama internasional untuk berbagi teknologi ramah lingkungan dan bantuan keuangan bagi negara-negara berkembang yang menghadapi dampak perubahan iklim. Diplomasi Indonesia dalam masalah perubahan iklim ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya terlibat dalam agenda perdamaian konvensional, tetapi juga dalam perjuangan untuk keberlanjutan planet ini.

Diplomasi Indonesia dalam Menghadapi Terorisme Global

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan berlokasi strategis di Asia Tenggara, memainkan peran penting dalam berbagai inisiatif internasional untuk memerangi terorisme global. Strategi diplomatik Indonesia dalam menangani ancaman terorisme global mencakup berbagai metodologi, termasuk kolaborasi multilateral, kebijakan lokal, dan partisipasi proaktif dalam forum internasional. Negara ini tidak hanya memprioritaskan keamanan tetapi juga mengadopsi pendekatan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari terorisme.

Secara historis, Indonesia telah menjadi target berbagai organisasi teroris, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berafiliasi dengan entitas luar negeri. Banyak serangan signifikan di Indonesia, termasuk pengeboman Bali tahun 2002 dan 2005, pengeboman Marriott dan Ritz-Carlton tahun 2009, dan insiden lainnya, menggambarkan bagaimana terorisme dapat melampaui batas negara dan membahayakan stabilitas global. Akibatnya, Indonesia harus mengembangkan strategi diplomatik yang memastikan stabilitas dalam negeri sambil berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif internasional untuk memerangi terorisme.

Aspek penting diplomasi Indonesia adalah kolaborasi multilateral. Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional yang berfokus pada penanggulangan terorisme, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, G-20, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia mendukung resolusi yang ditujukan untuk pemberantasan terorisme dalam platform PBB, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373, yang mendesak negara-negara anggota untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran informasi untuk mencegah terorisme. Indonesia berkontribusi dalam perumusan kebijakan internasional terkait penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara melalui Konvensi ASEAN tentang Penanggulangan Terorisme (ACCT), yang berupaya untuk meningkatkan kolaborasi keamanan di antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia memperkuat dedikasinya untuk melawan terorisme dengan merumuskan langkah-langkah internal yang bertujuan untuk mencegah radikalisasi. Pemerintah Indonesia bermitra dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, entitas keagamaan, dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan tema-tema perdamaian dan toleransi. Strategi ini

sangat penting untuk mengatasi akar fundamental terorisme, yang sering kali berkaitan dengan ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketidakpuasan terhadap otoritas pemerintah. Indonesia mengadvokasi penafsiran Islam yang moderat yang menumbuhkan toleransi di antara komunitas agama, yang sangat penting dalam mengurangi terorisme yang bermotif agama.

Tabel 1. Pendekatan diplomasi Indonesia dalam menghadapi terorisme global

Aspek Diplomasi	Interpretasi
Kerjasama Multilateral	Indonesia aktif dalam forum PBB, ASEAN, OKI, dan G-20 dalam memperkuat kerjasama internasional.
Kebijakan Domestik	Penanggulangan radikalisasi melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga keagamaan.
Peran Pemerintah	Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen dalam memerangi terorisme dengan kebijakan luar negeri yang mendukung perdamaian.
Pendidikan dan Deradikalisasi	Indonesia mengembangkan program pendidikan perdamaian dan keberagaman untuk mencegah radikalisasi.
Tantangan	Menyeimbangkan kebijakan keamanan dan hak asasi manusia, serta menangani gerakan terorisme domestik seperti ISIS dan JI.
Kerjasama dengan Negara-negara Jiran	Menguatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN dalam penanggulangan terorisme.
Forum Internasional	Indonesia berperan aktif di forum G-20 dan OKI, mempromosikan dialog antaragama dan perdamaian.

Sumber: Laporan Think Tank Internasional

Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Pada Kasus Aceh dan Timor Leste

Indonesia telah berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Aceh dan Timor Leste, dua wilayah yang telah mengalami pertikaian dan kekerasan dalam jangka panjang. Situasi di Aceh dan Timor Leste menggambarkan berbagai masalah penting yang dihadapi negara ini dalam menjaga integritas teritorial sekaligus mengatasi ketidakpuasan di wilayah tersebut. Strategi diplomatik, kolaborasi global, dan dedikasi untuk mencapai perdamaian sangat penting dalam penyelesaian konflik ini.

Konflik Aceh yang bermula pada akhir tahun 1970-an bermula dari ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat Indonesia yang dianggap mengabaikan kesejahteraan penduduk Aceh dan hak otonomi daerah. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menginginkan kemerdekaan Aceh, yang memicu kekerasan dan pembalasan dari pemerintah Indonesia. Indonesia menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi perselisihan ini, termasuk intervensi militer dan inisiatif diplomatik. Proses perdamaian Aceh dimulai dengan negosiasi yang dimediasi oleh entitas internasional, terutama negara-negara Eropa. Perjanjian damai Helsinki yang dicapai pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan tonggak penting dalam penyelesaian konflik Aceh.

Kesepakatan ini dicapai setelah upaya diplomatik yang ekstensif oleh pemerintah Indonesia, dibantu oleh fasilitator internasional seperti Finlandia dan beberapa negara Eropa lainnya. Selama periode itu, pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menunjukkan dedikasi yang kuat untuk menangani konflik melalui metode tanpa kekerasan. Perjanjian Helsinki mengamanatkan peningkatan otonomi bagi Aceh, hak-hak politik, dan amnesti bagi anggota GAM yang terlibat dalam konflik. Pelaksanaan perjanjian ini menandakan penghentian kekerasan yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan menjadi paradigma untuk penyelesaian konflik di wilayah lain. Sebaliknya, situasi di Timor Leste lebih rumit karena keterlibatan tindakan asing yang lebih besar dalam konflik tersebut. Timor Leste, yang pernah dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1975, telah mengalami pemberontakan dan pertikaian selama hampir dua dekade. Perang semakin intensif setelah referendum tahun 1999, di mana mayoritas penduduk Timor memilih untuk merdeka dari Indonesia. Setelah referendum, kerusuhan besar terjadi, yang mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk Timor Timur dan Indonesia. Setelah kerusuhan tersebut, Indonesia, meskipun awalnya menolak kemerdekaan

Timor Timur, akhirnya menyetujui resolusi internasional dan mendukung transisi menuju negara berdaulat.

Peran Indonesia dalam Menanggapi Isu Pengungsi dan Migrasi

Indonesia memainkan peran penting dalam menangani masalah pengungsi dan migrasi di tingkat regional dan global. Indonesia, yang dicirikan oleh jumlah penduduk yang besar dan posisi geografis yang vital di Asia Tenggara, berfungsi sebagai titik transit dan tujuan bagi banyak pengungsi dan migran yang melarikan diri dari konflik, bencana alam, dan ketidakstabilan politik di negara asal mereka. Sebaliknya, Indonesia secara aktif terlibat dalam kerja sama internasional untuk mengatasi masalah migrasi dan pengungsi.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah muncul sebagai tujuan bagi banyak pengungsi, terutama dari negara-negara yang dilanda kekerasan atau ketidakstabilan. Pengungsi Rohingya dari Myanmar merupakan salah satu kelompok terbesar yang tiba di Indonesia. Pada tahun 2015, Indonesia menampung sekitar seribu pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh setelah melarikan diri dari kekerasan dan prasangka di Myanmar. Meskipun tidak menandatangani Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951, Indonesia terus memberikan perlindungan sementara bagi para pengungsi melalui kebijakan ad hoc dan kerja sama dengan entitas internasional seperti UNHCR dan IOM. Indonesia menampung para pengungsi dengan menyediakan berbagai fasilitas penting seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan, namun para pengungsi tidak diberikan hak hukum untuk bekerja di negara ini.

Tantangan dan Hambatan dalam Diplomasi Perdamaian Indonesia

Namun demikian, meskipun Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam diplomasi internasional, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi dalam mewujudkan perdamaian global. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang ambisius, terutama dalam menghadapi masalah-masalah global yang kompleks. Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional, yang terkadang bisa saling bertentangan. Misalnya, dalam menghadapi masalah terorisme atau konflik antarnegara, Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil tidak hanya memenuhi harapan internasional, tetapi juga tidak mengorbankan stabilitas dan kepentingan nasional. Ketegangan internasional, seperti hubungan yang tegang antara negara-negara besar, juga dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam diplomasi internasional, karena Indonesia harus menjaga hubungan yang seimbang dengan semua pihak tanpa memilih pihak tertentu.

SIMPULAN

Indonesia melalui kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada prinsip bebas aktif, telah memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan perdamaian global, baik di tingkat internasional maupun regional. Dalam konteks internasional, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkontribusi dalam operasi penjaga perdamaian, dan mendukung penyelesaian konflik internasional dengan pendekatan damai. Keterlibatannya dalam diplomasi PBB menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip perdamaian, hukum internasional, dan multilateralisme. Di tingkat regional, Indonesia berperan sebagai aktor utama dalam ASEAN, dengan mempromosikan stabilitas dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara melalui diplomasi yang berbasis pada inklusivitas dan hukum internasional. Keberhasilan Indonesia dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di tingkat global dan regional, baik dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial, menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Sebagai negara dengan pengaruh politik dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan tercapainya perdamaian berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia perlu terus memperkuat perannya dalam forum-forum multilateral seperti PBB dan ASEAN, dengan fokus pada penyelesaian masalah global yang lebih luas, termasuk sosial-ekonomi. Diplomasi yang lebih inklusif dan kolaboratif akan memastikan

bahwa Indonesia tetap relevan dalam perdebatan internasional dan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan yang berdampak pada perdamaian global. Selain itu, Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas personel dan infrastruktur untuk mendukung operasi-operasi penjaga perdamaian internasional, guna memastikan keberlanjutan peran aktifnya dalam misi-misi perdamaian dunia. Penguatan kerjasama ekonomi ASEAN juga perlu menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan di antara negara-negara anggota. Indonesia, dengan perannya yang semakin penting, dapat menciptakan kawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan melalui integrasi ekonomi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiz, F. (11, oktober 2022). *Youtube*. From Nikmati dan Rasakan Setiap Detik yang Kamu Alami.: <https://youtu.be/tt76vtw92Hc>
- Kamajaya, A. P. (2024). Peran Imigrasi dalam Perkembangan Migrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1077-1086.
- Mahsun. (2011). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. . Jakarta: *Rajawali Pers*.
- Santoso, G. &. (n.d.). Proceedings of Educational Initiatives Research Colloquium 2019. 2019.
- Santoso, G. K. (2023). Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 157-170.
- Santoso, G. S. (2023). Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kecanggihan Aplikasi Google di MTs Muhammadiyah Tajurhalang. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 3(1), 50–63.
- Santoso, G. S. (2023). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya terhadap Karakter Cinta Damai Anak. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 107–113.
- Setiyaningsih, D. R. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. . *DIKDAS MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, September, 279–286.
- Soesilowati, S. (2017). Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 293-308.
- Utama, R. E. (2023). Penguatan Kemampuan Guru pada Google Meet, Gform, Gclassroom, Breakout Rooms, Jamboard, Recoording, Gdrive, Gdocs, Gmail, dan Whiteboarding. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 01(01), 1–6.
- Yusuf, N. S. (2022). Pengembangan Media Flipbook Berbasis Fabel untuk Meningkatkan Pemahaman Pesan Moral pada Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Bsicedu*.
- Zayzda, N. A. (2016). Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas. *Insignia: Journal of International Relations*, 3(02), 48-63.